

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Selain itu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi, (Renstra Kementan, 2020).

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/KPTS/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024, menetapkan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yaitu proyek terintegrasi yang disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, sehingga dapat terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/Badan Usaha. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui belanja K/L serta

sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Masyarakat, BUMN dan pendanaan lainnya.

Salah satu Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) /*Food Estate*. *Food Estate* (FE) adalah Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi. Pengembangan FE (KSPP) sesuai dengan amanat UU Pangan Pasal 12 ayat 5 dimana disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Menurut Renstra Kementan (2020), target dari FE (KSPP) adalah peningkatan Cadangan Pangan Nasional, dan Peningkatan kesejahteraan petani di FE (KSPP). *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang mencakup pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan berskala luas dengan menggunakan sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. *Food Estate* berbasis Korporasi petani adalah usaha pertanian skala besar berbasis klaster yang dilakukan secara terintegrasi dan berdaya saing mencakup komoditas pangan, hortikultura, ternak, perkebunan dilakukan melalui mekanisasi, modernisasi pertanian dan sistem digitalisasi sehingga mampu melakukan hilirisasi produksi pertanian sebagai industri dengan mengkorporasikan petani.

Inisiasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/*Food Estate* dilaksanakan di (1) Provinsi Kalimantan Tengah; (2) Provinsi Sumatera Utara; (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur; (4) Provinsi Sumatera Selatan dan (5) Provinsi Papua. Diharapkan selain ke lima provinsi tersebut, provinsi lain juga dapat mengembangkan KSPP/*Food Estate* dengan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dengan peran kelembagaan petani yang tumbuh dan berkembang menjadi korporasi petani sebagai pelakunya.

Sumatera Barat melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Andalas dalam proses pembuatan Laporan Road Map Penguatan Lembaga dan Rencana Bisnis Kawasan Korporasi Ternak Kambing Sumatera Barat. Laporan tersebut bertujuan untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini berisi tentang rencana, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam menguatkan Lembaga Kawasan Korporasi. Dokumen ini menjadi dasar yang legal bagi tindakan dari pihak terkait untuk kontribusi bagi penguatan Lembaga dan bisnis plan pengembangan Kawasan ternak kambing di Sumatera Barat.

Agam bagian Timur merupakan salah satu daerah yang akan terpilih menjadi kawasan korporasi ternak kambing Sumatera Barat, yang ditentukan oleh Pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terdapat 5 kelompok ternak kambing yang berada di Agam Timur yaitu, Kelompok Tani Talago Susu (Pakan Sinayan, Kec. Banuhampu), Kelompok Tani Rantiang Ameh (Nagari Bukik Batabuah, Kec. Canduang), Kelompok Tani Kandikia Agro (Nagari Gadut, Kec. Tilatang Kamang), Kelompok Tani Saayun Salangkah (Nagari Kamang Hilia, Kec. Kamang Magek) dan Kelompok Tani Satujuan Farm (Baso).

Kondisi usaha peternakan kambing di Kabupaten Agam terus mengalami kemajuan dalam jumlah produksi. Berdasarkan data BPS (2022) jumlah ternak kambing di Kabupaten Agam berjumlah 13.464 ekor pada tahun 2019, mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yaitu menjadi 14.203 ekor dan pada tahun 2021 menjadi 14.252 ekor. Hal ini tidak terlepas dari peran peternak kambing, kelompok maupun non kelompok dalam pemenuhan kebutuhan ternak kambing di Kabupaten Agam.

Dari yang lumrah terjadi, kelompok petani peternak penerima bantuan dari pemerintah biasanya jarang yang bisa berkembang usahanya. Bahkan, banyak peternak yang menjual ternaknya dan ada ternak yang mati. Seperti yang dikatakan Hermanto dan Swastika (2011), bahwa saat ini cukup sulit untuk menemukan kelompok tani yang aktif, dimana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kerja usahatani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Umumnya keberadaan

kelompok tani saat ini dicirikan antara lain kelompok tani tidak mandiri, partisipasi anggota sangat kurang, dan sebagian kelompok tidak kompak dan sebagian lagi sudah bubar namun masih terdaftar.

Permasalahan yang sama dialami oleh kelompok ternak kambing di Agam bagian Timur, dimana kelompok sudah bubar akan tetapi masih terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Kelompok tersebut bubar dikarenakan anggota yang sudah jarang melakukan komunikasi dan tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh ketua kelompok. Akan tetapi, salah satu anggota kelompok tersebut tetap melanjutkan usaha peternakan tersebut dan mempekerjakan orang lain dalam menjalankan usahanya. Selain itu, terdapat kasus yang sama dimana kelompok sudah tidak aktif sejak 3 tahun terakhir. Kelompok tersebut bubar dikarenakan pada saat masa Covid-19, banyak ternak kambing yang sakit dan anggota kelompok yang sudah tidak kompak dalam penyelesaian masalah yang ada.

Selain Covid-19, terdapat masalah yang dialami oleh kelompok ternak yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang ternak kambing kelompok. Hal tersebut membuat produksi ternak kambing pada kelompok mengalami penurunan yang signifikan karena tidak mendapatkan penanganan yang baik dari kelompok ternak. Permasalahan inilah yang dialami oleh kelompok ternak kambing Kandikia Agro yang berada di Gadut, Kec. Tilatang Kamang.

Begitu pula dengan Kelompok Ternak Satujuan Farm yang sudah resmi terbentuk pada 14 Maret 2022, akan tetapi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pemeliharaan kambing yang kurang efektif membuat perkembangan kelompok tersebut tidak begitu terlihat. Kambing yang dipelihara hanya dibebaskan di alam liar, tanpa memperdulikan pakan yang diberikan. Selain lokasi peternakan yang terletak di tepi jalan raya membuat kambing yang dibiarkan hidup bebas terancam bahaya yang sangat besar.

Masalah-masalah tersebut membuat kegiatan belajar atau pertemuan rutin yang sudah ditetapkan di awal pembentukan kelompok tidak terjalankan dengan baik. Meskipun komunikasi antar anggota masih bisa berjalan melalui grup whatsapp kelompok, akan tetapi tidak dapat dipastikan semua anggota kelompok membaca

informasi yang sudah dikirim ke dalam grup tersebut. Selain itu, anggota kelompok juga tidak dapat menjaga kekompakan dalam bekerja sama untuk menjalankan kegiatan pemeliharaan ternak kambing, dikarenakan anggota kelompok kurang bersemangat dalam menjalankan tugas masing-masing dalam kegiatan kelompok.

Pertanyaan umum yang timbul adalah bagaimana kelompok ternak dapat menjalankan fungsinya dalam persiapan pengembangan kawasan korporasi sedangkan kelompok tersebut saja kurang kompak bahkan sudah bubar? Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Fungsi Kelompok Terhadap Dinamika Kelompok Ternak dalam Rencana Pengembangan Kawasan Korporasi Ternak Kambing di Agam bagian Timur.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik anggota kelompok tani ternak kambing di Agam bagian Timur?
2. Bagaimana tingkatan fungsi kelompok tani ternak kambing di Agam bagian Timur?
3. Bagaimana pengaruh fungsi kelompok terhadap dinamika kelompok tani ternak kambing di Agam bagian Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik anggota kelompok tani ternak kambing di Agam bagian Timur.
2. Untuk mengetahui tingkatan fungsi kelompok tani ternak kambing di Agam bagian Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh fungsi kelompok terhadap dinamika kelompok tani ternak kambing di Agam bagian Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi kelompok ternak dalam pemenuhan kebutuhan ternak kambing.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Agam, dalam peningkatan peran dan fungsi kelompok ternak dalam pengembangan kawasan korporasi ternak kambing.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti tentang kelompok ternak dalam pengembangan kawasan korporasi ternak kambing.

